



**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BOS DI MA DARUL HADITS
HUTABARINGIN KEC. SIABU KAB. MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Dalam Ilmu Tarbiyah*

OLEH:

MUHAMMAD ALISAR LUBIS
NIM. 37.13.3.057

**JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BOS DI MA DARUL HADITS HUTABARINGIN
KEC. SIABU KAB. MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Dalam Ilmu Tarbiyah*

Oleh :

MUHAMMAD ALISAR LUBIS
NIM. 37.13.3.057

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Rosnita, MA
Nip:19580816 199803 2 001

Drs. Adlin Damanik, MAP
Nip: 19551212 198503 7 002

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Nama : Muhammad Alisar Lubis
Nim : 37.13.3.057
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Pembimbing Skripsi 1 : Dra. Hj. Rosnita, MA
Pembimbing Skripsi II : Drs. Adlin Damanik, MAP
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana BOS di
MA Darul Hadist Hutabaringin
Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal.

Kata Kunci : Pengelolaan, BOS

Telah dilakukan penelitian kualitatif yang bertujuan 1). Untuk mengetahui relevansi pengeolaan dana bos terhadap proses belajar mengajar di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hadist. 2). Untuk mengetahui pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hadist.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang meneliti terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hadist. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian diperoleh hasil bahwa relevansi pengelolaan dana bos di madrasah aliyah pondok pesantren darul hadist alhamdulillah telah relevan dengan proses belajar mengajar. Tim pengelola dana bantuan opsional sekolah (BOS) madrasah aliyah pondok pesantren darul hadist melakukan pengelolaan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana bos yang ada dalam juknis yang telah ditetapkan dan ditentukan pemerintah.

Mengetahui,
Pembimbing I

Dra. Hj. Rosnita, MA
NIP: 19580816 199803 2 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat berangkaian salam ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia.

Penulis menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana di Falkutas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universistas Islam Negeri Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil dari penelitian penulis yang berjudul "ANALISIS PENGELOLAAN DANA BOS DI MA DARUL HADIST HUTABARINGIN KEC. SIABU KAB. MANDAILING NATAL". Dalam penulis skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kesulitan yang di haadapi , namun berkat usaha dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaaan. Untuk itu penulis dengan kelapangan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini penulis juga menerima bantuan dari pihak oleh karena itu penulis menyampaikan ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Bapak Dr. H. Candra Wijaya, M. Pd selaku Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam, sekertaris jurusan bapak Dr. Abdillah M. Pd dan Staf

jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

4. Ibu Dra. Hj. Rosnita, MA, selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Adlin Damanik, MAP, selaku pembimbing II yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini selesai.
6. Terima kasih kepada Kepala Sekolah, Tim pengelola dana BOS, TU dan segenap pengajar MA DARUL HADIST yang selalu memberikan motivasi dan nasehat-nasehat kepada saya agar saya bisa selesaikan skripsi secepatnya.
7. Kedua orang tua, Ayahanda Muhammad Amin Lubis dan Ibunda Nur Jani Nst, yang selalu memberikan dukungan, baik materi dan doa yang selalu dipanjatkan untuk kemudahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar Kusnaldi, Efrida, Wahidin, Anhar, Mahmudin, Iwan Hakim, Zulhaidi, Nadilah, Alpi Syahrin Lubis yang telah membantu dan mendoakan saya selama perkuliahan.
9. Kepada keluarga Bapak Kh. Ali Amri Lubis dan Ibu Saharni Batubara serta keluarga Bapak H. Muhammad Nasir Lc, S. Pdi yang telah membantu dan mendoakan saya selama perkuliahan.
10. Untuk teman-teman Madid Mubarak, M. Rizqi Febri, Sutan Tampubolon, Fauzan Fikli Nst, Bardan Zukri, Roudhoh Hayati, , Zuhdi Maulana, Fahmi Rangkuti, Ilham Syarif dan teman-teman lainnya stambuk 2013. Berkat merekalah saya bisa selesai dan teman-teman saya lah yang memberikan motivasi dan bantuan pada saat yang tepat.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga Allah Swt senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Assalamualaikum Wr.Wb

Medan, April
2017

Penulis

Muhammad
Alisar Lubis

NIM:
37.13.3.057

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikas Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penenelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Analisis.....	13
B. Pengertian Analisis Kebijakan	14
1. Fungsi Analisis Kebijakan	14
2. Level Analisis Kebijakan	15
C. Analisis Pengelolaan	16
D. Pengertian BOS	17
1. Bantuan Operasional Sekolah	19
2. Tujuan BOS SMA/MA	20

3. Penggunaan Dana BOS	21
4. Larangan Penggunaan Dana BOS	23
E. Pengelolaan BOS SMA/MA	24
F. Prinsip Pengelolaan BOS	25
a. Swakelola dan Partisipatif.....	25
b. Transparan.....	26
c. Akuntabel	27
d. Demokratis	28
e. Efektif dan Efisien.....	29
f. Tertib Administrasi dan Pelaporan.....	29
g. Saling Percaya.....	31
G. Penelitian Yang Relevan	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Jadwal Penelitian	35
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
C. Sumber Data Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data.....	40
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	41

BAB IV TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum.....	44
B. Temuan Khusus.....	47
C. Pembahasan Hasil Penelitian	50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 52

B. Saran..... 53

DAFTAR PUSTAKA.....54

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel: 2. 1 : Penggunaan Dana BOS SMA	21
Tabel: 3.1 Jadwal Penelitian	35
Tabel: 4.1 Kondisi Sarana dan Prasarana MA Darul Hadist.....	45
Tabel: 4.2 Keadaan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	46
Tabel: 4.3 keadaan siswa MA	46
Tabel: 4.4 Kebutuhan Bantuan Yang Diharapkan	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli akan pendidikan dan dapat tergambarkan dari pencapaian pendidikan warga negaranya. Pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan. Di Indonesia, menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Adapun fungsi nasional pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu hal yang tidak dapat dilupakan dalam mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa adalah peran negara dalam menyediakan sarana pendidikan. Menurut Dwi Siswoyo, lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas serta berlangsungnya usaha pendidikan. Lingkungan tersebut dapat bersifat lingkungan fisik, sosial dan budaya yang semuanya memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap usaha

pendidikan.¹ Belum memadainya tempat pendidikan (gedung sekolah, sarana olahraga dan rekreasi), perlengkapan, alat pendidikan, materi pendidikan, kurangnya kerjasama antara berbagai lembaga dalam masyarakat, rendahnya pendidikan penduduk serta biaya pendidikan yang relatif mahal pada umumnya dapat menghambat berlangsungnya pendidikan dengan baik.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.² Salah satu peran negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.³

Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya pendidikan inilah yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah

¹ Dwi Siswoyo. (2013). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press, hal. 52

² Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³ Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah yang terdaftar. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut dengan BOS Nasional atau yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut BOS, selain BOS Nasional terdapat juga BOSDA (BOS Daerah) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah/Provinsi.

Dilihat dari perspektif pembiayaan pendidikan, pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem alokasi dan manajemen pembiayaan pendidikan. Di antaranya adalah semakin besarnya peranan daerah di satu pihak dan semakin berkurangnya peranan pusat dalam menentuan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan penggunaan anggaran pendidikan. Kewenangan pemerintah pusat terbatas pada penetapan kebijakan yang bersifat makro dalam bentuk pengalokasian anggaran untuk sekolah-sekolah dengan mengikuti standar rata-rata, sedangkan kebijakan-kebijakan yang bersifat mikro seperti alokasi dan distribusi anggaran pendidikan ke sekolah menjadi kewenangan daerah (dalam hal ini pemerintahan kabupaten/kota).⁴

Pengelolaan biaya pendidikan yang baik haruslah dibangun dengan pondasi yang kokoh karena pengelolaan yang kokoh tidak akan lari dari koridor yang ditetapkan dan akan menghasilkan pengelolaan yang efektif dan efisiensi. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-qur'an surat As-Shaf ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ ﴿٤﴾

*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*⁵

⁴ Dedi Supriadi. (2006). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 15-16

⁵ Departemen RI, (2016), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Ar-Rasyid*, Jakarta: Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, hal.551

Firman Allah diatas menerangkan bahwa dalam mengelola suatu hal diperlukan suatu prinsip sebagai pondasi dan benteng yang kokoh untuk menghasilkan pengelolaan yang baik dan teratur. Maka perlu sebagai pengelola melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya, karena hasil pengelolaan yang baik membutuhkan pondasi yang kokoh.

Program BOS merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu peraturan kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka memperlancar penuntasan buta aksara seperti amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2005, untuk itu Menteri Pendidikan membentuk tim pelaksana yang diatur dalam surat edaran nomor 5421/MPN/OT/2005.

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar dengan menjamin tidak terbebani oleh biaya pendidikan. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumen (*instrumental input*) yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.. Dalam kaitannya dengan keuangan sekolah, Mulyasa menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen keuangan sekolah perlu dilakukan untuk menunjang

penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.⁶

BOS mulai diterapkan sejak Juli 2005 dengan sasaran seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun bertujuan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan bantuan operasional sekolah (BOS). Keberhasilan pelaksanaan BOS dapat dilihat dari percepatan penuntasan wajib belajar.

Salah satu indikator percepatan penuntasan wajib belajar dapat diukur dengan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK). APK merupakan proporsi jumlah anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada usia tertentu.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD pada tahun 2005 telah mencapai 115% sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11% sehingga program belajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target yang direncanakan. Dana BOS memang sangat membantu percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun di Indonesia, namun masih banyak siswa lulusan SMP yang putus sekolah dan

⁶ Mulyasa, E. (2006). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 195

tidak melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk itu pemerintah telah mencanangkan dan melaksanakan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) sejak tahun 2013.⁷

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMA untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat.⁸

Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa salah satu sasaran penyelenggaraan PMU adalah mempercepat pencapaian APK pendidikan menengah menjadi 97% pada tahun 2020. Pendidikan Menengah Universal (PMU) bertujuan untuk memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah menyusun program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menengah yang disalurkan kepada seluruh SMA dan MA baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Dana BOS yang diberikan kepada sekolah menengah atas disebut dengan BOS SMA. Sedangkan dana BOS yang diberikan kepada sekolah kejuruan disebut dengan BOS SMK.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA atau MA merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMA) dengan besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan dengan besarnya satuan dana

⁷ Anonim. (2012). *Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. <http://bos.kemdikbud.go.id/home/about> (diakses pada tanggal 19 desember 2016).

⁸ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.

bantuan. Tujuan umum BOS SMA atau MA adalah mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat.

Peranan BOS SMA adalah memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu dengan mewajibkan sekolah memberikan keringanan/pengurangan biaya operasional sekolah kepada siswa. Dana BOS yang diterima akan diperhitungkan untuk meringankan beban semua siswa pada sekolah tersebut secara rata-rata. Adapun penggunaan dana BOS SMA atau MA menurut Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah atau personalia. Berdasarkan Kebijakan Direktorat Pembinaan SMA, dana BOS dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk pembelajaran, penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian, pembelian peralatan tangan untuk keperluan pendidikan, pembelian bahan praktik dan bahan habis pakai, penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler, penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi, penyelenggaraan praktik kerja industri, pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah, langganan daya dan jasa lain, kegiatan penerimaan siswa baru, pengembangan sekolah rujukan, peningkatan mutu proses pembelajaran, operasional layanan sekolah berbasis TIK dan pelaporan.

Pelaksanaan program BOS SMA atau MA harus mengikuti pedoman yang disusun oleh Pemerintah dalam Petunjuk Teknis BOS SMA atau MA dengan mengutamakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu prinsip swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien,

tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya. Pada konsep MBS, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menuntut prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kewenangan kepada sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Sekolah memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program BOS sesuai dengan kebutuhan peserta didik namun harus memperhatikan 7 prinsip pengelolaan program BOS yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Pengelolaan dana BOS di sekolah belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Hasil Pemeriksaan BPK Semester I tahun 2015 menyatakan terdapat beberapa masalah terkait pengelolaan dana BOS. Permasalahan umum mengenai pengelolaan dana BOS yang menjadi temuan BPK meliputi sisa dana BOS yang belum dikembalikan ke kas negara, penyebab kekurangan penerimaan negara atas sisa dana, penggunaan dana BOS yang tidak sesuai ketentuan, kelebihan penggunaan dana BOS, ketidakakuratan dalam pendataan penerima dana BOS yang menyebabkan kelebihan penyaluran dana BOS, penyusunan petunjuk teknis penyaluran dana BOS belum tepat sesuai dengan ketentuan sekolah dan sejumlah sekolah belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS.⁹

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan BOS ditinjau dari 7 prinsip pengelolaan BOS, maka diperlukan suatu analisis. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis digunakan untuk menghasilkan dan menyajikan informasi

⁹ Republika. (2016). *DPD Soroti Temuan BPK Terkait Pengelolaan Dana BOS*. Melalui <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/22/o1c62k359-dpd-soroti-temuan-bpk-terkait-pengelolaan-dana-bos>, (diakses pada tanggal 19 desember 2016).

sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan dari pembuat kebijakan dalam membuat suatu keputusan. Analisis juga digunakan untuk menentukan tolak ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan dan penentuan.

Melihat arti pentingnya analisis pengelolaan program BOS dalam penyelenggaraan pendidikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi pada Madrasah Aliyah Darul Hadist)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Aliyah Darul Hadist Kabupaten Mandailing Natal.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul yaitu:

1. Belum memadainya tempat pendidikan (gedung sekolah, sarana olahraga dan rekreasi), perlengkapan, alat pendidikan, materi pendidikan, kurangnya kerjasama antara berbagai lembaga dalam masyarakat dan rendahnya pendidikan masyarakat.
2. Pembiayaan pendidikan untuk mencukupi kebutuhan investasi, operasional, dan personal sekolah merupakan salah satu masalah pokok di bidang pendidikan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga penelitian yang dilakukan bisa lebih fokus dalam menggali masalah pada analisis pengelolaan

dana BOS. Selain itu juga berfungsi untuk meminimalkan adanya penafsiran ganda terhadap penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini akan membatasi permasalahan mengenai analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hadist disesuaikan dengan prinsip dalam Petunjuk Teknis BOS tahun 2015 yaitu swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta prinsip saling percaya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka diperoleh rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana relevansi pengelolaan Dana BOS terhadap proses belajar mengajar di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hadist?
2. Bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hadist?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui relevansi pengeolaan dana bos terhadap proses belajar mengajar di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hadist.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hadist.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan dana BOS.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti lain yang terkait dengan analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditinjau dari yaitu prinsip swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta prinsip saling percaya.
 - c. Hasil penelitian juga dapat bermanfaat untuk memberikan landasan dari pembuat kebijakan dalam membuat suatu keputusan tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Siswa dan Orang Tua
 - 1) Ikut terlibat aktif dalam pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah.
 - 2) Mengetahui penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara transparan dan akuntabel.
 - b. Bagi Pemerintah
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih efektif.

2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi tim manajemen BOS dalam mengevaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih efektif

c. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan dalam rangka pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah agar lebih efektif dan efisien.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Analisis

Analisis merupakan salah satu hal yang penting dalam menentukan suatu kebijakan. Analisis digunakan untuk menentukan tolak ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan dan penentuan suatu kebijakan. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan.

Analisis dapat dibagi menjadi dua macam yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa kualitatif maupun kuantitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa, prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga menguatkan suatu gambaran baru atau yang sudah ada. Sedangkan data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk jumlah yang digunakan untuk menerangkan suatu kejelasan dari angka-angka atau membandingkan dari beberapa gambaran sehingga memperoleh gambaran yang baru, kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk uraian atau kalimat.

Berdasarkan pengertian analisis tersebut yang dimaksud analisis pada penelitian ini adalah pengolahan suatu data yang didapat dari penelitian guna mengetahui keadaan yang sebenarnya yakni untuk mengetahui bagaimana tingkat

keberhasilan pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan 7 prinsip pengelolaan dalam petunjuk teknis pengelolaan BOS.

B. Pengertian Analisis Kebijakan

Menurut Meltsner analisis kebijakan merupakan sarana mensintesis informasi yang mencakup hasil-hasil riset untuk menghasilkan suatu format bagi keputusan kebijakan dan penentuan kebutuhan masa depan bagi informasi yang berkaitan dengan kebijakan.¹⁰ Menurut Riant Nugroho analisis kebijakan merupakan proses pengkajian multidisipliner yang dirancang secara kreatif, dengan penilaian yang kritis, dan mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat dan dipahami serta meningkatkan kebijakan.¹¹

1. Fungsi Analisis Kebijakan

Menurut Nanang Fattah fungsi analisis kebijakan dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori besar yaitu:

- a. Fungsi alokasi yang menekankan pada fungsi analisis kebijakan dalam penentuan agenda analisis kebijakan
- b. Fungsi inkuiri yang menekankan pada fungsi analisis kebijakan dalam dimensi rasional dalam rangka menghasilkan informasi teknis yang berguna sebagai masukan bagi proses pembuatan keputusan pendidikan

¹⁰Muchlis Hamdi. (2014). *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 114

¹¹ Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan yang Unggul : Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 5

- c. Fungsi komunikasi yaitu cara-cara atau prosedur yang efisien dalam memasarkan hasil-hasil analisis kebijakan sehingga memiliki dampak yang berarti bagi proses pembuatan keputusan.¹²

2. Level Analisis Kebijakan

Menurut Pearson analisis kebijakan dikelompokkan ke dalam empat level yaitu:¹³

- a) Analisis meta (*meta analysis*)
Analisis meta adalah analisis terhadap analisis. Yaitu berkenaan dengan aktivitas analisis dan dengan pemahaman ide bahwa kebijakan publik berproses dengan menggunakan metafor. Analisis ini mempertimbangkan metode dan pendekatan yang digunakan dalam studi kebijakan publik.
- b) Analisis meso (*meso analysis*)
Analisis meso adalah analisis terhadap definisi masalah, penetapan agenda dan pembentukan kebijakan. Dalam analisis ini, perhatian berkaitan dengan bagaimana masalah dibentuk dan dibingkai.
- c) Analisis keputusan (*decision analysis*)
Analisis keputusan adalah analisis terhadap proses pembuatan keputusan dan analisis kebijakan untuk pengambilan keputusan. Analisis ini berkaitan dengan penggambaran bagaimana suatu keputusan atau serangkaian keputusan dibuat.
- d) Analisis pelaksanaan (*delivery analysis*)
Analisis pelaksanaan adalah analisis terhadap implementasi, evaluasi, dan dampak perubahan. Analisis ini berkenaan dengan tujuan pelaksanaan dari proses kebijakan yang dibingkai oleh upaya memodelkan seperangkat sekuensi rasional.

Dalam penelitian ini, level analisis yang digunakan adalah analisis pelaksanaan. Penelitian ini menganalisis tentang pelaksanaan dalam pengelolaan program BOS berdasarkan 7 prinsip pengelolaan dana BOS.

¹² Nanang Fattah. (2013). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 12

¹³ Muchlis Hamdi. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*, hal. 126

C. Analisis Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Menurut H. Malayu S.P Hasibuan pengelolaan atau manajemen adalah ilmu seni dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁴ Pengertian manajemen menurut George R. Terry merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perenanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untu mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.¹⁵ Keuangan sekolah merupakan bagian yang sangat penting karena setiap kegiatan sekolah membutuhkan dana untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan. Tujuan dari pengelolaan dana pendidikan khususnya keuangan sekolah menurut Mulyono adalah:¹⁶

- 1) Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali
- 2) Memelihara barang-barang sekolah
- 3) Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.

¹⁴ Mesiono. (2014). *Manajemen Organisasi*. Bandung: Cita Pustaka, hal. 2

¹⁵ Eti Rochaety, et.al. (2010). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, hal. 4

¹⁶ Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, hal. 172

Salah satu pengelolaan keuangan sekolah yang dilakukan adalah pengelolaan BOS. BOS sebagai salah satu sumber pendapatan sekolah harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan peserta didik. Pengelolaan BOS setiap sekolah diatur pemerintah melalui Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS. Dalam petunjuk teknis tersebut ada 7 prinsip utama pengelolaan berdasarkan konsep MBS yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan BOS di sekolah, maka diperlukan suatu analisis. Analisis pengelolaan merupakan analisis untuk menentukan tolak ukur dan tingkat keberhasilan pengelolaan suatu program.

D. Pengertian BOS

Dalam organisasi sekolah, fungsi uang atau dana di antaranya sebagai penunjang lancarnya kegiatan utama, yaitu melakukan proses pendidikan dan pengajaran. Lebih-lebih dalam era persaingan seperti sekarang ini, perubahan dan inovasi menjadi suatu tuntutan. Maka bisa dimengerti bahwa betapa pentingnya dana dan biaya dalam suatu pendidikan.

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015 mendefinisikan BOS SMA sebagai program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke SMA baik Negeri ataupun Swasta dimana besarnya dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan satuan biaya (*unit cost*) bantuan. Sedangkan dana BOS SMA adalah

bantuan dana untuk membantu Sekolah Menengah Kejuruan negeri dan swasta dalam memenuhi biaya operasional sekolah non personalia.¹⁷

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Sedangkan standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA atau MA.

Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan¹⁸. Maka sudah sepantasnya pengelolaan dan pengalokasian atau penggunaan keuangan dilakukan oleh sekolah dengan baik. Menurut Syaiful Sagala, jika pembiayaan pendidikan tidak terpenuhi, paling tidak sesuai dengan kebutuhan minimal, secara nasional akan ditemukan dampak berupa terjadinya erosi kualitas sehingga kontribusinya terhadap pembangunan rendah.¹⁹

¹⁷ Dirjen Pendidikan Menengah tentang petunjuk teknik BOS SMA tahun 2015, hal.3

¹⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 12

¹⁹Sri Minarti. (2016). *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, hal. 209

1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015 meliputi:

- Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan perubahan terakhir Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun

2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMA), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun Anggaran 2015 nomor DIPA-023.12.1.666053/2015 tanggal 14 November 2014.

2) Tujuan BOS SMA/MA

Menurut Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015 tujuan BOS SMA dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, tujuan BOS SMA adalah mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia. Sedangkan tujuan khusus BOS SMA adalah:²⁰

- a) Membantu biaya personalia nonpersonalia sekolah
- b) Mengurangi angka putus sekolah siswa SMA
- c) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA
- d) Mewujudkan keberpihakan pemerintah (*affirmative action*) bagi siswa SMA dengan cara meringankan biaya sekolah
- e) Memberikan kesempatan bagi siswa SMA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu
- f) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah

²⁰ Ibid., hal. 3

3) Penggunaan Dana BOS

BOS digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional sekolah non personalia. Peruntukan dana BOS SMA tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia tahun 2009 untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Berikut ini merupakan peruntukan penggunaan dana BOS SMA menurut praturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia adalah:²¹

Tabel: 2.1 Penggunaan Dana BOS SMA

No	Peruntukan Dana	Penjelasan
1	Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran	Biaya untuk mengganti buku yang rusak dan menambah buku referensi maupun buku teks pelajaran
2	Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran	Pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran
3	Penggandaan soal dan penyediaan lembarjawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian	Meliputi ulangan harian, ulangan tengah semester, akhir semester, umum dan ujian Sekolah
4	Pembelian peralatan Pendidikan	Jenis-jenis peralatan yang tidak termasuk dalam kategori aset, antara lain pembelian: peralatan praktikum IPA, praktikum IPS, praktikum bahasa, peralatan ringan (<i>handtools</i>) dan peralatan raga/kesenian
5	Pembelian bahan praktik/bahan habis pakai	Meliputi pembelian : bahan baku praktikum IPA, bahan praktikum IPS, bahan praktikum bahasa, bahan praktikum komputer, bahan praktik kejuruan, dan bahan-bahan olahraga/kesenian, tinta dan toner printer.
6	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler	Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti: pramuka, palang

²¹ Ibid., hal. 26-32

		merah remaja (PMR), kegiatan pembinaan olimpiade sains, seni dan olahraga
7	Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi	Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan ujian kompetensi bagi siswa SMA yang akan lulus
8	Penyelenggaraan praktik kerja industri/ PKL (dalam negeri)	Biaya untuk penyelenggaraan praktik kerja industri/lapangan bagi siswa SMA, diantaranya perjalanan dinas pembimbing dalam mencari tempat praktik/bimbingan/pemantauan siswa praktik
9	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah	Biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan. Contoh: pengecatan, perbaikan lantai, perbaikan kamar mandi, perbaikan papan tulis, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
10	Langganan daya dan jasa lainnya	Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa atau kekurangannya yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti: listrik, telepon, air, internet sewa domain, apabila biaya tersebut belum terpenuhi dari biaya yang tersedia dari Pemerintah Daerah/Yayasan
11	Kegiatan penerimaan siswa baru (PSB)	Biaya untuk pengadaan formulir pendaftaran dan administrasi pendaftaran meliputi biaya fotocopy dan konsumsi panitia PSB
12	Pengembangan sekolah Rujukan	Membiayai perjalanan dinas pada pertemuan yang diadakan oleh Direktorat dan atau pembahasan pengembangan sekolah rujukan di wilayah dan atau konsumsi rapat pembahasan program sekolah aliannya
13	Peningkatan mutu proses Pembelajaran	Membiayai pembelian bahan/komponen material untuk praktik perakitan dan atau pengembangan e-book, mendatangkan guru/pengajar tamu yang profesional, menambah dan meningkatkan

Selain hal tersebut, dana BOS SMA juga dapat digunakan untuk membiayai hal-hal berikut:

- a) Pembiayaan pendampingan bagi SMA yang melaksanakan kurikulum 2013.
 - b) Pembelian konsumsi berupa snack dan atau makan dapat diadakan dalam rangka pertemuan pembahasan terkait pengembangan dan atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan program sekolah.
 - c) Dana BOS dapat digunakan untuk membayar jasa profesi yang diperlukan dalam rangka perbaikan dan pemeliharaan ringan sarana dan prasarana sekolah.
- 4) Larangan Penggunaan Dana BOS

Dana bos yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah
4. dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
5. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak Sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
7. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah).
8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
9. Membangun gedung/ruangan baru.
10. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
11. Menanamkan saham.
12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.
13. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi Sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.

14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.
15. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru.²²

E. Pengelolaan BOS SMA/MA

Dalam Petunjuk Teknis BOS SMA Tahun 2015 disebutkan bahwa pada tingkat sekolah, pengelolaan program BOS dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Kepala Sekolah. Panitia tersebut terdiri dari unsur kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan komite sekolah yang dibentuk secara musyawarah. Adapun susunan panitia adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab program
- b. Wakil kepala sekolah atau guru yang relevan sebagai ketua panitia pelaksana
- c. Guru sebagai penanggungjawab
- d. Bendahara rutin sekolah atau bendahara yang ditunjuk khusus oleh kepala sekolah sebagai pengelola keuangan.

Pengelolaan program BOS SMA juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Komite sekolah berperan dalam memberikan dukungan dalam wujud bantuan tenaga maupun pemikiran, pengontrol kualitas pelaksanaan program, dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat.

²² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS

- b. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku berkenaan dengan pelaksanaan program bantuan.
- c. Informasi program harus mudah diketahui oleh warga sekolah atau dengan menempelkan pelaksanaan kegiatan melalui papan pengumuman.

F. Prinsip Pengelolaan BOS

Dalam program BOS, dana yang diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah. Dengan demikian, program BOS sangat mendukung implementasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

a) Swakelola dan Partisipatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, swakelola berarti pengelolaan sendiri. Swakelola yang dimaksud disini adalah swakelola dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan dengan swakelola menata lainnya, atau oleh kelompok masyarakat.

Pelaksanaan program dilakukan secara swakelola (direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri) dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu aspek penting dalam menerapkan konsep Manajemen Berbasis

Sekolah adalah partisipasi dari masyarakat. Partisipasi penting untuk meningkatkan rasa memiliki, peningkatan rasa memiliki akan meningkatkan rasa tanggung jawab, dan peningkatan tanggung jawab akan meningkatkan dedikasi/kontribusi.

MBS menuntut partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan (kepala sekolah, orang tua murid, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dunia usaha, dan anggota masyarakat lainnya) untuk andil secara insentif di dalam operasi sekolah. Partisipasi yang insentif menjadi keharusan karena sekolah harus makin banyak tumbuh dengan menyangga sendiri seara finansial.²³

Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah tersebut mungkin dapat menimbulkan tumpang tindih kepentingan antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Dengan demikian perlu dibatasi bentuk partisipasi setiap unsur secara jelas dan tegas.

b) Transparan

Menurut Engkoswara manajemen sekolah dilaksanakan secara transparan, mudah diakses anggota, manajemen memberikan laporan secara kontinu sehingga *stakeholders* dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah.²⁴ Manajemen pendidikan yang transparan memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan keyakinan *stakeholders* terhadap kewibawaan dan citra sekolah yang *good governance* dan *clean governance*.

²³ Sudarwan Danim. (2008). *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, hal. 141

²⁴ *Ibid.*, hal. 295

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam hal ini adalah masyarakat dan warga sekolah dapat diperoleh secara langsung.

Jadi, Pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.

c) Akuntabel

Menurut PP no 48 Tahun 2008 pasal 59, prinsip akuntabilitas dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵ Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien kepada pemberi tanggung jawab. Menurut Nanang Fattah ukuran pendidikan yang akuntabel adalah:²⁶

- 1) Tujuannya jelas dan dapat dijabarkan menjadi tujuan-tujuan khusus
- 2) Kegiatannya dapat diawasi agar selalu dapat mengarah pada pencapaian tujuan
- 3) Hasilnya efektif karena tujuan tercapai
- 4) Proses pencapaian hasil itu efisien dengan mengingat sumber-sumber yang tersedia
- 5) Menjalankan mekanisme umpan balik untuk penyempurnaan.

²⁵ Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

²⁶ Nanang Fattah. *Analisis Kebijakan Pendidikan*, hal. 93

Tuntutan akuntabilitas sekolah sebagai salah satu sektor publik adalah untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*).

d) Demokratis

Istilah demokratis berasal dari bahasa Yunani kuno, yang terdiri dari dua kata yaitu *demos* yang bermakna rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan, dan apabila digabungkan bermakna kekuasaan ditangan rakyat.²⁷ Istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme kepemimpinan lembaga pendidikan, namun secara substantif sekolah demokratis adalah membawa semangat demokrasi tersebut dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Sekolah demokratis akan terwujud jika semua informasi penting dapat dijangkau *stakeholder* sekolah sehingga semua unsur tersebut memahami arah pengembangan, berbagai masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang sedang atau akan ditempuh. Dengan demikian mereka akan bisa menganalisis relevansi kebijakan, memahami, mengkritisi, dan memberi masukan, serta menentukan kontribusi dan partisipasi yang akan diberikan untuk kesuksesan pelaksanaan program-program sekolah tersebut.

Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan

²⁷ Dede Rosyada. (2004). *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta : Kencana, hal. 15

kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat.

e) Efektif dan Efisien

Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik, kegiatan tersebut disebut efisiensi dan efektifitas.²⁸ Gie menyatakan bahwa efektifitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan nilai guna yang diharapkan. Sedangkan Akmal menyatakan bahwa efektifitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya (*doing the right thing*) atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil.²⁹

Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa efektivitas dan efisiensi berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif dari anggota.

f) Tertib Administrasi dan Pelaporan

Administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh administrator secara teratur dan diatur melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan.³⁰ Laporan keuangan merupakan catatan dan rangkuman kegiatan transaksi untuk menyediakan informasi akuntansi kepada pemangku kepentingan. Menurut Suwardjono tujuan utama pelaporan keuangan organisasi nonbisnis seperti sekolah adalah harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat

²⁸Moch. Idochi Anwar. (2013). *Administrasi Pendidikan Dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 210

²⁹ Donni Juni Priansa dan Agus Garnida. (2015). *Manajemen Perkantoran*. Bandung: Alfabeta, hal. 11

³⁰ Abdurrahmat Fathoni. (2006). *Organisasi & Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 17

keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut.³¹

Adapun tujuan-tujuan Spesifik dari pelaporan keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan pemakai lain dalam menilai jasa-jasa yang disediakan organisasi dan kemampuannya untuk terus menyediakan jasa-jasa tersebut.
2. Menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan pemakai lain dalam menilai bagaimana para manajer organisasi nonbisnis telah melaksanakan tanggungjawab kepengurusannya dan aspek-aspek lain kinerjanya.
3. Menyediakan informasi tentang sumberdaya, kewajiban dan sumberdaya (aset) bersih organisasi, dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya dan hak atas sumberdaya tersebut.
4. Menyediakan informasi tentang kinerja organisasi selama satu periode.
5. Menyediakan informasi tentang bagaimana organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas atas sumber likuid lain, tentang pinjaman dan pelunasannya, dan tentang faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
6. Pelaporan keuangan harus mencakup penjelasan-penjelasan dan interpretasi untuk membantu para pemakai memahami informasi yang disediakan.

³¹ Suwardjono, 2005. *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi 3, Yogyakarta: BPFE, hal. 20

Menurut Petunjuk Teknis BOS SMA 2015, pelaporan dilakukan dengan menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Sekolah penerima dana BOS SMA melakukan pelaporan atas penggunaan dan pengelolaan dana yang diberikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program.³²

g) Saling Percaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata percaya diartikan sebagai mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata; mengangap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada; dan menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur. Pengertian percaya dalam penelitian ini adalah yakin terhadap orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam pengelolaan BOS jujur dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya. Kepercayaan yang dimaksud yaitu orang tua percaya pada kepala sekolah untuk mengembangkan program-program sekolah menuju idealitas yang diinginkan dan kepala sekolah juga percaya pada guru untuk mengembangkan program-program kurikulumnya serta mengorganisir pelaksanaan program-program itu. Kepercayaan juga meliputi kepercayaan sekolah terhadap pemerintah sebagai pemberi dana dalam mengelola dan menyalurkan dana BOS.

G. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amalia Fajri pada tahun 2012 yang berjudul “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Tahun 2011”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perencanaan dana BOS di SMP

³² Dirjen Pendidikan Menengah tentang petunjuk teknik BOS SMA tahun 2015, hal.43

N 3 Pekuncen dilakukan pada saat penyusunan RAPBS, disusun oleh tim yang ditunjuk oleh kepala sekolah dan diketahui oleh Komite Sekolah, Guru, Karyawan, dan orang tua siswa. Sekolah juga telah menunjuk bendahara BOS untuk menangani masalah keuangan BOS. (2) dari segi pelaksanaan, penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional non personalia sekolah sesuai dengan buku panduan. Pembelian barang dan jasa dilakukan oleh tim belanja barang dengan diketahui oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS. Pembukuan dilakukan setiap hari dan setiap ada pengeluaran. (3) Pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana BOS dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal dilakukan oleh Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan pada saat rapat. Secara eksternal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas setiap triwulan sekali. (4) Pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan setiap triwulan kepada Dinas dengan menyerahkan SPJ BOS yang berisi buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan bukti pengeluaran. Persamaan dengan penelitian ini adalah melakukan penelitian terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Perbedaannya adalah penelitian Rizky Amalia Fajri meneliti pengelolaan dana BOS yang dilakukan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedangkan pada penelitian ini adalah meneliti di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Khafifah Julia Dwi 2010 yang berjudul “Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah dasar Negeri I Patuk Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan program bantuan operasional sekolah (BOS) terdiri dari: perencanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meliputi penyusunan RAPBS, identifikasi kebutuhan sekolah yang akan didanai dengan dana BOS, dan perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan dana BOS. Pelaksanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meliputi kegiatan penyalura dana BOS, penggunaan dana BOS yang disesuaikan dengan RAPBS. Evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terdiri dari kegiatan pelaporan, monitoring, dan pengawasan. Kegiatan pelaporan dalam bentuk laporan penggunaan dana BOS yang dibuat oleh bendahara setiap triwulan. Kegiatan monitoring dan pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah dan tim monitoring manajemen BOS Kabupaten/Kota dengan memeriksa laporan keuangan setiap triwulan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan di sekolah. (2) Hambatan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu besarnya dana BOS kurang mencukupi kebutuhan sekolah, terjadi keterlambatan dan kesulitan dalam pembuatan laporan penggunaan dana BOS karena kurangnya waktu dan pengetahuan bendahara dalam pengelola keuangan. (3) cara mengatasi hambatan kekurangan dana BOS yaitu dengan menarik iuran sukarela dari orang tua siswa. Upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi keterlambatan pembuaan laporan yaitu dengan cara membantu bendahara BOS dalam pembuatan laporan keuangan. Persamaan dengan penelitian ini adalah melakukan penelitian terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Perbedaannya adalah penelitian Nur Khafifah

Julia Dwi meneliti pengelolaan dana BOS yang dilakukan di tingkat Sekolah Dasar (SD) sedangkan pada penelitian ini adalah meneliti di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Dalam di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hadist di desa Hutabaringin, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dalam waktu bulan terhitung dari bulan januari hingga april 2017.

(Tabel: 3.1 Jadwal Penelitian)

No	Uraian	Januari				Februari				Maret				April			
		Minggu Ke															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penelitian			■	■	■											
2.	Perencanaan penelitian					■	■										
3.	Pengumpulan Data Objek Penelitian							■									
4.	Observasi Partisipatif								■	■							
5.	Wawancara (Interview)										■	■					
6.	Pengolahan Data												■				
7.	Penyusunan Laporan														■	■	■

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan untuk mengkaji mengenai Manajemen Kinerja Guru Pasca Sertifikasi di MTs Negeri 2 Medan menggunakan metode yang digunakan adalah jenis kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Persepektif, strategi, dan model yang dikembangkan sangat beragam. Sebab itu tidak mengherankan jika terdapat anggapan bahwa *Qualitative research is many thing to many people*.³³

Dalam penelitian kualitatif, akan terjadi tiga kemungkinan terhadap “masalah” yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Dengan demikian judul proposal dengan judul laporan penelitian sama. Yang kedua “masalah” yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dengan demikian tidak terlalu banyak perubahan, sehingga judul penelitian cukup di sempurnakan. Yang ketiga “masalah” yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total, sehingga harus “ganti” masalah. Dengan demikian judul profosal dengan judul penelitian tidak sama dan judulnya diganti. Dalam instuisi tertentu, judul yang diganti ini sering mengalami kesulitan administrasi. Oleh karena itu, instuisi yang menangani penelitian kualitatif, harus mau dan mampu menyesuaikan dengan karakteristik masalah kualitatif ini.

³³ Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, h. 20.

Penelitian kualitatif ini berakar pada latar alamiah sebagai kebutuhan mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek penelitian.³⁴

Dasar teoritis penelitian kualitatif bertumpun pada pendekatan fenomenologis, interaksi simbolik, kebudayaan dan etnomologi. Pendekatan fenomenologis berusaha memahami subjek dari segi pandangan mereka sendiri. Interaksi simbolik mendasarkan diri daripada pengalaman manusia yang ditengahi oleh penafsiran; segala sesuatu tidak memiliki pengertian sendiri-sendiri, sedangkan pengertian itu dikenakan padanya oleh seseorang sehingga dalam hal ini penafsiran menjadi esensial. Di pihak lain, kebudayaan dipandang menimbulkan perilaku. Terakhir, etnometodologi merupakan studi tentang bagaimana individu menciptakan dan mencapai kehidupannya sehari-hari.

B. Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah guru-guru yang telah serterfikasi. Adapun sumber data yang dapat dipergunakan dalam penelitian ini didasari data sumber yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu sumber poko yang diterima langsung dalam penulisan yaitu kepala sekolah, bendahara, guru dan kepala tata usaha.
2. Sumber data skunder, yaitu sumber data pendukung atau pelengkap yang diperoleh secara langsung dari dokumen-dokumen, data-data serta buku-

³⁴ Masyuri dan Zainuddin. (2008). *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*. Bandung: PT Refika Aditama, h. 22.

buku referensi yang membahas permasalahan penelitian tersebut yang di peroleh dari Tata Usaha (TU).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁵

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi Partisipatif

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai pengamat tahap awal observasi masih merupakan tahap memahami situasi untuk memudahkan dalam menyesuaikan diri dengan sekolah. pada tahap ini banyak dimanfaatkan untuk berkenalan dengan dengan kepala sekolah, guru maupun staf sekolah dan yang terpenting adalah mengutamakan tujuan yang sebenarnya. Dengan tahap ini peneliti akan merasa yakin dapat berbaur dengan lingkungan baru (lingkungan sekolah) yang digunakan sebagai sumber data bagi peneliti.

³⁵ Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, h. 308.

Pengamatan ini dilakukan dengan cara mengamati kegiatan bekerja guru yang berlangsung di MTs Negeri 2 Medan dan peneliti akan mempersiapkan lembar observasi. Instrumen yang digunakan dalam observasi yaitu kamera (tustel) , buku catatan (notes), alat tulis, Lembar Panduan Wawancara, dan Lembar Blangko Checklist.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Dengan wawancara ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa wawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap pewawancara mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara.³⁶

Dalam wawancara ini yang menjadi sasaran wawancara adalah kepala sekolah, guru, siswa dan tenaga pendidikan lainnya. Dalam kelakukan proses wawancara, jika ingin berhasil maka pewawancara harus meu mendengar dengan penuh rasa sabar, dapat melakukan interaksi dengan responden secara baik dan mampu memberi umpan balik dengan baik apa yang sedang ditanyakan jika suatu hasil wawancara belum cukup memberikan informasi yang diharapkan pewawancara. Adapaun instrumen yang yang dibunakan dalam wawancara yaitu Alat Perekam Suara, Lembar Pedoman Wawancara, camera, alat tulis, dan notes (buku catatan).

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengadakan pengajian terhadap dokumen-dokumen yang dinanggap mendukung hasil penelitian. Analisis dokumn

³⁶ *Ibid: 318*

dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik disekolah maupun diluar sekolah, yang ada hubungannya dengan mutu pendidikan yang dilakukan oleh personil sekolah. adapun instrumen yang digunakan ialah tustel/kamera, lembar blangkos checklist, handycam dan foto-foto sekolah.

D. Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bodgan menyatakan bahwa *“Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, field notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others”* Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁷

Adapun analisis data yang digunakan oleh model Milles dan Hubberman yaitu:³⁸

1. Reduksi Data

Reduksi data bertujuan untuk memudahkan membuat kesimpulan data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian. Reduksi data dimulai dengan mengidentifikasi semua catatan dan data lapangan yang memiliki makna yang berkaitan dengan masalah fokus penelitian, data yang tidak memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian harus disisihkan dari kumpulan data kemudian membuat kode pada setiap satuan supaya tetap dapat ditelusuri asalnya dan dapat membuat hipotesis (menjawab pertanyaan penelitian).

³⁷ *Ibid: 332*

³⁸ *Ibid: 334*

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. "*looking at displays help us to understand what is happening and to do some thing-further analysis or countin on that understanding.*

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

2. Pengujian Keteralihan (*Transferability*)

Transferability merupakan bahwa validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

Nilai transfer ini berkaitan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer tergantung pada pemakai, hingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain.

Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

3. Pengujian Ketergantungan (*Depenability*)

Dalam penelitian kualitatif, depenabilitu disebut reliabilitas. Sesuatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/merepleksi hasil penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *depenability* dilakukan dengan menggunakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya,

dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keeluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Jika peneliti tak mempunyai dan tak dapat menunjukkan “jejak aktivitas lapangannya”, amka depenabilitas penelitiannya patut diragukan.

4. Pengujian Ketegasan (*Confirmability*)

Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitiannya disepakiti banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji confirbility mirip dengan uji dependability, sehingga pengujinya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji confirbility berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confilbility. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TEMUAN UMUM

1. Profil Sekolah

Nama Madrasah	: MA DARUL HADITS
NSM	: 131212130019
NPSN	: 10260097
Izin Operasional	: NO.Tgl: Kw.02/5-d/PP.03.2/2984/2008
Akreditasi (Tanggal dan Tahun)	: 09 November 2011
Alamat Madrasah	: Hutabaringin
Kecamatan	: Siabu
Kabupaten/Kota	: Mandailing Natal
Tahun berdiri	: 2006
NPWP	: 20.023.104.1-118.000
Nama Kepala Madrasah	: H. Muhammad Nasir, Lc.S.Pd.I
No.Telp. HP	: 081263775681
Nama Yayasan	: Pondok Pesantren Darul Hadits
Alamat Yayasan	: Hutabaringin Kecamatan Siabu
No. Telp. HP	: 081361029745
Akte Yayasan/Notaris	: Indra Syarifhalim, SH. 1./1 Agustus 1996
Kepemilikan Yayasan	: a. Status Tanah : Milik Yayasan
	b. Luas Tanah : $162 \text{ m}^2 \times 24 \text{ m}^2 = 3.888 \text{ m}^2$
	c. Tanah Kosong : $20 \text{ m}^2 \times 60 \text{ m}^2 = 1200 \text{ m}^2$

2. Visi Dan Misi MA Darul Hadist

Visi MA Darul Hadist:

Menciptakan madrasah yang unggul dan lulusan yang beriman, bertaqwa serta berilmu.

Misi MA Darul Hadist:

1. Meningkatkan prestasi akademik lulusan.
2. Meningkatkan kemampuan berbahasa inggris dan bahasa arab.

3. Menumbuhkan minat baca.
4. Meningkatkan prestasi ekstra krikuler (pengembangan potensi diri).
5. Membentuk peserta didik yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur sesuai ajaran islam.

3. Keadaan Sarana Prasarana

TABEL: 4.1 Kondisi Sarana dan Prasarana di Madrasah Aliyah Darul Hadist Mandailing Natal

No.	Keterangan Gedung	Jumlah	Keadaan/kondisi				
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Luas m ²	Ket
1	Ruang Kelas	6	3	2	1	384	
2	Ruang Perpustakaan	1	1			16	
3	Ruang Laboratorium IPA	-					
4	Ruang Kepala	1	1			12	
5	Ruang Guru	1			1		
6	Mushola	1	1			100	
7	Ruang Uks	1		1		16	
8	Ruang BP/BK	-					
9	Gudang	1		1		12	
10	Ruang Sirkulasi	-					
11	Ruang Kamar Mandi Kepala						
12	Ruang Kamar Mandi Guru	2					
13	Ruang Kamar Mandi Siswa Putra	3	3				
14	Ruang Kamar Mandi Putri	3	3				
15	Halaman/Lapangan Olahraga	1	1				

4. Keadaan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan

Tabel: 4.2 Keadaan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan

No.	Pengelola	PNS		Non PNS		Jumlah
	Tenaga Pendidik	Lk	Pr	Lk	Pr	
1	Guru PNS diperbantukan Tetap					
2	Guru Tetap Yayasan			11	13	24
3	Guru Honorer					
4	Guru Tidak Tetap				4	4
5	Kepala Tata Usaha				1	1
6	Staf Tata Usaha				1	1
7	Staf Tata Usaha (Honorer)					
JUMLAH						30

5. Keadaan Siswa MA

Tabel: 4.3 keadaan siswa MA

Keadaan Kelas Siswa	T.P 2013/2014				T.P 2014/2015			
	Jlh Rombel	Lk	Pr	Jlh	Jlh Rombel	Lk	Pr	Jlh
Kelas X	2	23	26	49	2	30	49	74
Kelas XI	2	16	22	38	2	23	28	51
Kelas XII	2	33	25	58	2	14	17	31
JUMLAH				145				160

6. Kebutuhan Bantuan Yang Diharapkan

Tabel: 4.4 Kebutuhan Bantuan Yang Diharapkan

No	KEBUTUHAN	Jumlah Unit
1	Ruang Kelas Baru	2
2	Ruang Perpustakaan	1

3	Ruang Labolatorium IPA	1
4	Ruang Labolatorium Bahasa	1
5	Rehab Berat	-
6	Rehab Sedang	3
7	Rehab Ringan	-

B. TEMUAN KHUSUS

1. Relevansi Pengelolaan Dana BOS Terhadap Belajar Mengajar

Wawancara dengan bapak H. Muhammad Nasir Nst, S. Pd sebagai Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hadist di ruangan kepala sekolah. Pada tanggal 26 Februari 2017 pukul 11.30 WIB. Peneliti mengajukan pertanyaan tentang bagaimana relevansi pengelolaan dana bos terhadap proses belajar mengajar di madrasah aliyah pondok pesantren darul hadist?. Jawaban kepala madrasah adalah sebagai berikut:

Dalam proses belajar mengajar tentu dan pasti sekolah manapun membutuhkan dengan adanya sarana prasarana yang memenuhi standar agar bisa terlaksana dengan baik agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Untuk itu dibutuhkanlah dana untuk menunjang sarana prasarana yang baik agar terlaksana proses belajar mengajar yang diinginkan. Dengan adanya program pemerintah yaitu bantuan operasional sekolah ini sngatlah membantu dalam proses belajar mengajar, karena dengan adanya dana bos ini madrasah bisa memberikan dana untuk renovasi atau perbaikan ruangan belajar yang sudah cukup layak dalam dunia pendidikan. Dan dengan dana BOS madrasah bisa mengembangkan perpustakaan yaitu membeli dan memelihara buku teks pelajaran untuk para siswa dan bisa menjadi pegangan bagi para guru yang sesuai dengan kurikulum madrasah ini.

Selanjutnya, wawancara dengan Ibu Hanipah Aini Lubis, S.Pd sebagai Bendahara di madrasah aliyah pondok pesantren darul hadist di ruangan Tata Usaha pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 10.00 WIB.

Bantuan operasional sekolah ini sangatlah menguntungkan bagi sekolah dalam mengadakan proses belajar yang efektif dan efisien. Artinya, semua pengelolaan dana bos harus direlevankan dengan proses belajar agar bisa menghasilkan proses belajar yang nyaman dan kondusif bagi siswa dan siswi. Apalagi di madrasah ini masih banyak ruangan yang ingin direnovasi untuk proses belajar mengajar yang nyaman, karena di madrasah ini memisahkan ruangan belajar siswa dan ruangan siswi. Dan membutuhkan dana lebih dengan adanya dana Bos ini sangatlah membantu kami dalam merenovasi ruangan yang kurang layak.

Kemudian, wawancara dengan Ibu Syamsiah Nst, S.Pd sebagai Guru Matematika di madrasah aliyah pondok pesantren darul hadist di ruang guru pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 13.00 WIB.

Kalau berbicara relevansi menurut yang saya lihat dan amati pengalokasian dana bos tersebut sudah cukup relevan dengan proses belajar mengajar, karena didalam proses belajar mengajar kami tidak mendapatkan kendala-kendala misalnya bangku-bangku siswa dan siswi tidak ada ditemukan yang tidak layak untuk proses belajar mengajar. Siswa yang kurang mampu atau miskin pun menerima bantuan dari dana BOS yaitu dengan dipenuhinya seragam sekolah siswa sehingga bisa mengikuti proses belajar mengajar di MA Darul Hadist.

Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa relevansi pengelolaan dana bos terhadap proses belajar mengajar sangatlah relevan dan besar pengaruhnya, karena dana bos yang di terima ditujukan untuk pengadaan sarana dan prasaran dalam melangsungkan proses belajar mengajar dalam madrasah aliyah pondok pesantren darul hadist.

2. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak H. Muhammad Nasir Nst, S.Pd sebagai kepala madrasah aliyah pondok pesantren darul hadist di ruangan kepala sekolah pada tanggal 27 februari 2017 pukul 11.30 WIB. Peneliti menanyakan tentang bagaimana pengelolaan dana Bantuan

Operasional Sekolah di madrasah aliyah ini. Apakah sesuai dengan 7 prinsip pengelolaan dana BOS?. Jawaban kepala madrasah adalah sebagai berikut:

Menurut saya pengelolaan dana bos di madrasah ini alhamdulillah sudah berjalan dengan yang telah ditentukan dalam juknis dana bos, namun dalam pengelolaan dana bos ini terkadang banyak kendala-kendala yang di dapat dalam proses pencairan dana bos tetapi itu semua terlaksana dengan baik berkat kerjakeras semua staf-staf madrasah dalam menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Dalam pengelolaan dana bos juga dilakukan dengan pembukuan dan publikasi kepada wali murid. Tim pengelola dana bos juga melakukan atau melaksanakan pengelolaan sesuai dengan yang ada dalam juknis dana bos baik dari segi swakelola, pelaporan dan pembukuan, transparan, saling percaya, demokratis dan keefektifan. Semua pengelolaan berpanduan pada juknis dana bos yang telah ditetapkan pemerintah.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Paridah Hannum A,md sebagai kepala Tata Usaha Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Hadist pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 10.00 Wib.

Saya sebagai kepala Tata Usaha madrasah aliyah pondok pesantren darul hadist menilai bahwa apa yang kami kerjakan sesuai dengan juknis dana bos. Artinya, dalam hal ini pengelolaan dana bos di madrasah kami masih menganut sesuai dengan yang ada dalam juknis tersebut. Pengelolaan dana bos ini kami juga melakukan pembukuan dan pelaporan bersama tim dana bos yang di madrasah ini. Namun dalam hal penggunaan untuk pembangunan sudah terbilang cukup baik tetapi masih kurang memadai dalam standar pendidikan nasional karena keterbatasan dana yang diperoleh, karena dana bos ini tidak bisa untuk dijadikan satu-satunya pegangan dalam pembangunan. Artinya, mdrasah kami ini masih membutuhkan dana lain untuk pembangunan yang memadai dalam standar pendidikan nasional. Dan kami juga memenuhi kebutuhan siswa yang kurang mampu dengan dan bos, yaitu dengan menyediakan pralatan-pralatan sekolah yang para siswa atau santri butuhkan seperti seragam sekolah, dan tas.

Maka dapat diambil kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan bahwa pengelolan dana bos di madrasah aliyah pondok pesantren darul hadist ini alhamdulillah baik yaitu masih bserjalan sesuai dengan koridor atau ketetapan yang telah ditentukan dalam juknis dana bos. Maka dari itu

pengelolaan yang sudah baik ini harus ditingkatkan lagi untuk bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lain.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian, pembahasan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap hasil penelitian. Pembahasan ini dapat diuraikan sesuai temuan penelitian sebagai berikut:

Tahap pertama: relevansi Pengelolaan Dana BOS Terhadap Belajar Mengajar.

Pengelolaan adalah seni dalam mengatur dan menata dalam sebuah wadah demi tercapainya tujuan yang di tetapkan bersama. Pengelolaan ini mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Relevansi pengelolalan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di madrasah aliyah pondok pesantren darul hadist ini terhadap proses belajar mengajar sudah sesuai atau relevan, karena setiap dana bos yang di peruntukkan terhadap sarana prasarana sekolah layak dipakai atau digunakan untuk proses belajar mengajar di madrasah aliyah pondok pesantren darul hadist.

Pengelolaan dana bos yang baik akan berakibatkan baik terhadap proses belajar mengajar yaitu dengan terjangkaunya biaya, dan lingkungan belajar yang nyaman dan aman, sehingga peserta didik yang kurang mampu juga bisa merasakan pendidikan yang layak untuk dirinya sebagai generasi bangsa yang lebih baik lagi.

Tahap kedua: pengelolaan dana bos sesuai dengan 7 prinsip pengelolaan dana bos.

Pengelolaan adalah esensial yang baik di semua kerja sama yang dikoordinasi, disemua tingkat organisasi, yang pelaksanaannya sering ada kendala atau sering ada masalah. Pengelolaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap sekolah.

Prinsip pengelolaan dana bos merupakan hal yang diperlukan sekolah sebagai pegangan atau pedoman dalam melaksanakan dan mengelola dana bos agar relevan dengan proses belajar mengajar didalam lingkungan sekolah. Yaitu lingkungan yang nyaman, aman, dan memadai sesuai dengan standar pendidikan nasional.

Tim pengelola dana bos di madrasah aliyah pondok pesantren darul hadist dalam hal ini melakukan pengelolaan sesuai dengan yang ada dalam juknis dana bos yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Relevansi pengelolaan dana bos di madrasah aliyah pondok pesantren darul hadist alhamdulillah telah relevan dengan proses belajar mengajar, karena setiap dana bos yang di salurkan di dalam madrasah tersebut, baik berupa sarana maupun prasarana dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan proses belajar mengajar. Dengan pengelolaan tersebut dana bos telah membuka kesempatan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya dengan biaya yang murah dan dengan nominal yang sangat terjangkau bagi peserta didik.
2. Pengelolaan dana bos di madrasah aliyah pondok pesantren darul hadist alhamdulillah sudah sangat baik. Hal ini dikarenakan tim pengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS) madrasah aliyah pondok pesantren darul hadist melakukan pengelolaan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana bos yang ada dalam juknis yang telah ditetapkan dan ditentukan pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan pada beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi kepala sekolah, diharapkan untuk bekerjasama dengan tim pengelola dana bos di madrasah aliyah pondok pesantren darul hadist dengan baik, supaya pembuatan Laporan Pengelolaan Dana BOS SMA dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.
2. Bagi tim pengelola dana bos serta kepala TU dan staf-staf aliyah pondok darul hadist Memanfaatkan peningkatan kualitas dan kuantitas mutu pendidikan dari adanya Dana BOS Madrasah Aliyah. Sehingga dapat meningkatkan proses belajar mengajar yang lebih baik lagi.
3. Untuk guru-guru, komite sekolah, dan para siswa diharapkan partisipasi lebih untuk mengawasi dan lebih kritis terhadap pengelolaan dana bos agar terciptanya pengelolaan yang disiplin administrasi dan terhindarnya dari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin saja terjadi kapan saja dan oleh siapa saja. Sehingga terwujudnya pengelolaan yang bermutu dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. *Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*.
<http://bos.kemdikbud.go.id/home/about> (diakses pada tanggal 19
desember 2016).
- Anwar, Moch. Idochi. 2013. *Administrasi Pendidikan Dan Manajemen Biaya
Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka
Cipta,.
- Danim, Sudarwan. 2008. *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Jakarta: PT Bumi
Aksara.
- Departemen RI. 2016. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Ar-Rasyid*, Jakarta:
Maktabah Al-Fatih Rasyid Media.
- Dirjen Pendidikan Menengah tentang petunjuk teknik BOS SMA tahun 2015
- E. Mulyasa. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan
Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi & Manajemen Sumber Daya Manusia*.
Jakarta: rineka cipta.
- Fattah, Nanang. 2013 *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja
Posdakarya.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*.
Bogor: Ghalia Indonesia.

- Masyuri dan Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mesiono. 2014. *Manajemen Organisasi*. Bandung: Cita Pustaka.
- Minarti, Sri. 2016. *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul: Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Khafifah Julia Dwi. 2010. *Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 1 Patuk Kabupaten Gunungkidul*. Skripsi. Yogyakarta: UNY,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 12
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Priansa, Donni Juni dan Agus Garnida. 2015. *Manajemen Perkantoran*. Bandung: Alfabeta,

Republika. 2016. *DPD Soroti Temuan BPK Terkait Pengelolaan Dana BOS*. Melalui <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/22/o1c62k359-dpd-soroti-temuan-bpk-terkait-pengelolaan-dana-bos>, (diakses pada tanggal 19 desember 2016)

Rizky Amalia Fajri. 2012. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS SMA) di SMP Negeri 3 Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Tahun 2011*. Skripsi. Yogyakarta: UNY

Rochaety, Eti., Pontjorini Rahayuningsih, Prima Gusti Yanti. 2010. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Rosyada, Dede. 2004 *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Siswoyo, Dwi. 2013. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.

Sugiyono. 2015 *Metode Penelitian Kombinasi* Bandung: Alfabeta.

Supriadi, Dedi. 2006. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi 3, Yogyakarta: BPFE.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.